



## Pemkot Jogja Pastikan Jamkesda hingga 2016

**Setelah Itu Dilayani JKN yang Dikelola BPJS**

**JOGJA** - Pemkot Jogja memastikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tetap diberlakukan sampai dengan 2016 mendatang. Setelah itu, masyarakat Kota Jogja akan dilayani melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Hal itu seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Kota Jogja no 405/09/SE/2015 ke semua Kelurahan di Kota Jogja tertanggal (26/1) tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Jogja, setelah diterbitkan buku pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

"Jamkesda masih memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi warga Kota Jogja sampai dengan 2016 dengan ketentuan persyaratan sesuai Perwal no 19/2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Jogja," ujar Sekretaris Kota Jogja Titik Sulastri kemarin (4/2).

Dalam Perwal No 19/2014 terdapat tujuh ketentuan persyaratan Jamkesda, seperti penduduk miskin yang tidak masuk JKN maupun Jamkesos dengan identitas kartu menuju sejahtera (KMS). Kemudian penduduk Kota Jogja yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan identitas KTP dan Kartu Keluarga dan penyandang masalah sosial dengan identitas surat kete-

rangan dan institusi yang berwenang. Dalam SE juga disebutkan, buku pedoman penyelenggaraan JKN akan diberikan ke masyarakat, untuk mempermudah proses keikutsertaan masyarakat dalam mengurus JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (PKD) Kota Jogja Umi Nur Chariyati menjelaskan, program Jamkesda nantinya akan terintegrasi dalam JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Hingga awal 2015 ini sudah 63,78 persen warga Kota Jogja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Rata-rata dalam sebulan ada peningkatan kepesertaan secara mandiri sebanyak satu persen," terangnya.

Umi menambahkan, selain kepesertaan secara mandiri, juga terdapat peserta Penetrasi Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari warga kurang mampu. Kota Jogja mendapatkan kuota PBI sebanyak 105.632 peserta. Data itu berdasarkan survei BPS yang dilakukan 2011 silam. Menurutnya, dari pendataan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, terdapat 40 ribu jiwa yang datanya tidak valid. "Harapannya nanti bisa terus di-update, sehingga satanya sesuai," ungkapnya. (pra/laz/gp)



**COVER PERAWATAN:** Jamkesda tetap diberlakukan hingga 2016. Setelah itu warga dilayani melalui JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

RADAR JOGJA FILE

**UPT Jamkesda** ✓ **Netral** ✓ **segera** ✓ **untuk diketahui**  
 Dim. Kesehatan  
 Yogyakarta, .....  
 Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 04 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005